

STRATEGI KEAMANAN DAN PERTAHANAN REGIONAL AFRIKA (STUDI KASUS PERAN UNI AFRIKA DALAM MENGATASI KONFLIK DAN ANCAMAN NON-TRADISIONAL PERIODE 2022 – 2024)

Rezha Murti Permana¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

Regional security and defense are crucial aspects of maintaining stability in various regions, especially in the modern era marked by both conventional and non-traditional threats. This study highlights security dynamics across different global regions, with a primary focus on Africa, where armed conflicts, extremism, and transnational crimes remain significant challenges. The African Union (AU) plays a central role in addressing these threats through collective security strategies, conflict mediation, and peacekeeping missions such as the African Union Mission in Somalia (AMISOM). Additionally, the AU is actively involved in counterterrorism efforts and enhancing the military capacity of member states through the African Peace and Security Architecture (APSA) policy. However, several challenges persist, including financial constraints, lack of coordination among member states, and external influences that often complicate security situations. To enhance its effectiveness, the AU needs to strengthen institutional structures, improve financial capacity, and deepen cooperation with international organizations and local actors. This study emphasizes that the success of Africa's regional security and defense strategies heavily depends on the collective commitment of African nations to address shared challenges and strengthen regional integration. Thus, the African Union can establish itself as a key actor in fostering sustainable stability and security across the continent.

Keywords: Regional Security and Defense, The African Union (AU), Security Strategy, Security Threats

ABSTRAK

Keamanan dan pertahanan regional merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama di era modern yang diwarnai oleh ancaman konvensional maupun non-tradisional. Studi ini menyoroti dinamika keamanan di berbagai kawasan dunia dengan fokus utama pada Afrika, di mana konflik bersenjata, ekstremisme, dan kejahatan lintas negara masih menjadi tantangan utama. Uni Afrika (AU) memainkan peran sentral dalam mengatasi berbagai ancaman ini melalui strategi keamanan kolektif, mediasi konflik, serta misi penjaga perdamaian seperti African Union Mission in Somalia (AMISOM). Selain itu, AU turut serta dalam upaya pemberantasan terorisme dan peningkatan kapasitas militer negara-negara anggota melalui kebijakan African Peace and Security Architecture (APSA). Namun, tantangan yang dihadapi masih besar, termasuk keterbatasan pendanaan, kurangnya koordinasi antar negara anggota, serta pengaruh kekuatan eksternal yang kerap memperumit situasi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, AU perlu memperkuat struktur kelembagaan, meningkatkan kapasitas keuangan, serta memperdalam kerja sama dengan organisasi internasional dan aktor lokal. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan strategi keamanan dan pertahanan regional Afrika sangat bergantung pada komitmen kolektif negara-negara Afrika dalam menghadapi tantangan bersama serta memperkuat integrasi regional. Dengan demikian, Uni Afrika dapat menjadi aktor utama dalam menciptakan stabilitas dan keamanan berkelanjutan di benua Afrika

Kata Kunci: Keamanan dan Pertahanan Regional, Uni Afrika (AU), Strategi Keamanan, Ancaman Keamanan

PENDAHULUAN

Kondisi keamanan dan ketahanan regional di Afrika mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh benua ini, yang tidak hanya melibatkan isu-isu konvensional, tetapi juga ancaman non-tradisional yang semakin meningkat. Afrika dikenal sebagai benua dengan keberagaman budaya dan etnis yang sangat kaya, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Afrika juga seringkali menjadi pusat berbagai konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan politik yang memengaruhi tidak hanya negara-negara yang bersangkutan, tetapi juga stabilitas regional secara keseluruhan. Dalam beberapa dekade terakhir, konflik bersenjata tetap menjadi tantangan utama di Afrika. Menurut Zakiyah (2015), sekitar 65% negara di Afrika telah mengalami konflik bersenjata dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Data dari Vines (2013) menambahkan bahwa sekitar 64% konflik tersebut berakhir dalam waktu lima tahun, sementara 22% lainnya baru selesai setelah lebih dari sebelas tahun. Hal ini menunjukkan bahwa konflik di Afrika cenderung bersifat berkepanjangan dan sulit diselesaikan secara cepat.

Selain itu, statistik global juga menegaskan bahwa Afrika merupakan salah satu pusat konflik dunia. Dari tahun 1955 hingga 2009, sekitar 40% perang dunia berlangsung di Afrika, termasuk konflik etnis dan perang revolusioner (Williams, 2011). Afrika juga tercatat sebagai rumah bagi lebih dari sepertiga konflik etnis di dunia selama periode 1990 hingga 2009. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, konflik bersenjata tetap berlangsung, seperti yang terlihat pada tiga perang yang terjadi pada tahun 2011 dan empat perang termasuk dua kudeta militer pada tahun 2012 (Vines, 2013).

Konflik internal di Afrika sering dipicu oleh perselisihan yang berkaitan dengan identitas etnis, agama, serta perebutan sumber daya alam yang sangat berharga. Contohnya dapat dilihat di wilayah Sudan, khususnya Darfur, dan Republik Demokratik Kongo, yang telah mengalami konflik berkepanjangan dengan dampak yang sangat merugikan jutaan penduduk. Ketidakstabilan politik juga memperburuk situasi keamanan di Afrika. Beberapa negara seperti Mali, Guinea, dan Burkina Faso mengalami kudeta militer dalam beberapa tahun terakhir yang mencerminkan kerentanan sistem politik di kawasan tersebut. Ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan yang korup dan tidak responsif menjadi salah satu pemicu utama ketidakstabilan. Transisi politik yang tidak mulus membuka ruang bagi kelompok bersenjata dan elemen kriminal untuk memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Kondisi ini diperparah oleh keterlibatan aktor eksternal seperti kelompok teroris Boko Haram di Nigeria, Al-Shabaab di Somalia, dan kelompok afiliasi ISIS di Afrika Barat, yang menambah lapisan kompleksitas ancaman keamanan dan ketidakstabilan regional (Zakiyah, 2015).

Selain ancaman tradisional, Afrika juga dihadapkan pada tantangan non-tradisional yang semakin rumit dan berdampak luas. Perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang memperburuk kerentanan masyarakat di berbagai kawasan, terutama di wilayah Sahel dan Afrika Timur. Fenomena seperti kekeringan berkepanjangan, banjir, dan degradasi lahan telah menyebabkan krisis pangan yang serius, memicu migrasi paksa, dan menimbulkan ketegangan sosial antar komunitas yang saling berebut sumber daya alam yang semakin

menipis. Krisis ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko keamanan baru. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga menunjukkan betapa rapuhnya sistem kesehatan dan ekonomi di banyak negara Afrika, menggarisbawahi kebutuhan akan koordinasi yang lebih efektif dalam menghadapi krisis kesehatan global dan ancaman lainnya di masa depan.

Masalah keamanan di Afrika telah mendapat perhatian besar dari komunitas internasional dan regional, sehingga berbagai misi penjaga perdamaian telah dikirim oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi regional seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Afrika (AU). Namun, keberhasilan intervensi ini masih sangat terbatas. Sejumlah misi PBB, seperti yang terjadi di Rwanda, gagal melindungi warga sipil dari genosida, sementara misi di Somalia juga mengalami kegagalan yang mengakibatkan jatuhnya korban pasukan penjaga perdamaian (Yorke, 2001). Selain itu, AU juga menghadapi kegagalan dalam menangani konflik seperti di Haite d'Ivoire dan tidak mampu mengambil alih intervensi NATO dalam konflik Libya pada 2011 (Vines, 2013).

Kegagalan operasi perdamaian tersebut memicu perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi keamanan. Satu kelompok menekankan pentingnya “solusi Afrika untuk masalah Afrika”, yang menegaskan bahwa Afrika harus mengambil tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan masalah keamanan dan konflik dengan sumber daya dan kapabilitas mereka sendiri, karena masyarakat lokal dianggap lebih memahami konteks dan nilai-nilai budaya yang ada (Wagner, 2013; Soderbaum dan Tavares, 2009). Sebaliknya, kelompok lain mengkritik gagasan ini dengan alasan keterbatasan kemampuan organisasi regional, kekurangan dana, dan keterbatasan sumber daya militer yang menghambat efektivitas misi perdamaian di lapangan (Vines, 2013).

Berdasarkan kompleksitas situasi tersebut, peneliti berasumsi bahwa penyelesaian konflik dan ancaman non-tradisional di Afrika seyogianya dipimpin oleh aktor yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi lokal, yaitu Uni Afrika (AU). Peran AU diharapkan dapat diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di benua ini, sementara dukungan dari organisasi internasional dan negara-negara lain tetap diperlukan sebagai pelengkap untuk meningkatkan efektivitas penanganan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Uni Afrika dalam mengatasi konflik dan ancaman non-tradisional di Afrika selama periode 2022 hingga 2024, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keamanan regional dan strategi yang diterapkan oleh AU dalam menghadapi tantangan tersebut.

KERANGKA TEORITIS

Kerangka Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis dengan mengkaji empat teori yaitu teori keamanan regional (Regional Security Complex Theory - RSCT), teori konstruktivisme, teori organisasi internasional, dan teori non-traditional security studies. Keempat teori tersebut dipilih karena memiliki relevansi yang tinggi dalam menganalisis strategi keamanan dan pertahanan regional afrika.

Teori Kompleks Keamanan Regional (Regional Security Complex Theory/RSCT) yang dikembangkan oleh Buzan dan Wæver (2003) menjelaskan bahwa dinamika

keamanan paling intens terjadi di tingkat regional, bukan global. RSCT berangkat dari konsep kompleks keamanan, yaitu keterkaitan erat antarnegara dalam satu kawasan yang menghadapi ancaman keamanan serupa. Dalam konteks ini, ancaman terhadap satu negara cenderung berdampak langsung pada negara lain di kawasan yang sama. Teori ini juga menekankan pentingnya saling ketergantungan keamanan yang bersifat timbal balik, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun militer, serta dipengaruhi oleh kedekatan geografis dan distribusi kapabilitas keamanan. Faktor-faktor seperti pembagian kerja, konsentrasi sumber daya, dan aglomerasi ekonomi turut memperkuat hubungan keamanan antarnegara dalam klaster regional.

Selain itu, RSCT mengintegrasikan konsep sekuritisasi, yaitu proses ketika suatu isu dibingkai sebagai ancaman eksistensial, sehingga membenarkan tindakan luar biasa. Aktor sekuritisasi, seperti negara atau organisasi regional, memegang peran penting dalam mendefinisikan ancaman dan membentuk agenda keamanan, sedangkan aktor yang disekuritisasi adalah pihak yang dikonstruksikan sebagai ancaman tersebut. RSCT juga mencakup dimensi kerja sama dan konflik dalam kompleks keamanan, termasuk pengaruh aktor eksternal dan keterlibatan aktor non-negara. Teori ini memperluas pemahaman keamanan tidak hanya pada aspek militer, tetapi juga isu-isu non-tradisional seperti perubahan iklim, kesehatan, dan migrasi. Dengan demikian, RSCT menjadi kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami pola ancaman, aliansi, dan respons keamanan dalam konteks regional, termasuk di kawasan Afrika.

Teori Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional menekankan bahwa norma, identitas, dan ide memainkan peran sentral dalam membentuk realitas politik global, dengan melihat dunia sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antar aktor, baik negara maupun non-negara. Tidak seperti pendekatan materialis, konstruktivisme berfokus pada bagaimana aktor mengartikan dan membingkai isu-isu seperti hak asasi manusia, keamanan manusia (*human security*), serta perdagangan manusia, sebagai ancaman melalui proses sekuritisasi. Norma-norma tersebut tidak muncul secara alami, tetapi berkembang dari dinamika sosial, budaya, dan sejarah, yang kemudian memengaruhi perilaku aktor internasional dan pembentukan kebijakan. Kekuatan dalam konstruktivisme tidak hanya mencakup aspek fisik atau ekonomi, tetapi juga kemampuan membentuk persepsi nilai, dan makna dalam sistem internasional (Baylis et al., 2011).

Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan hukum antarnegara dengan tujuan utama menjalin kerja sama dan menjaga perdamaian dunia dalam konteks hubungan internasional (Hartana, 2022). Organisasi ini memiliki kepribadian hukum internasional dan dapat beranggotakan negara maupun entitas non-negara, yang bersama-sama turut serta dalam pembentukan norma dan hukum internasional (Adelia, Salsabila & Sari, 2024). Pembentukan organisasi internasional didorong oleh kebutuhan akan kerja sama global dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hingga kemanusiaan, dan memiliki fungsi penting sebagai forum perundingan, pelaksana kebijakan, serta promotor nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial (Iskandar, 2021). Meski tidak memiliki unsur objektif seperti negara, eksistensi organisasi internasional sah apabila didasarkan pada perjanjian antarnegara (Wagiman, 2016). Organisasi ini diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, seperti organisasi universal vs regional, politik vs teknis, serta kerja sama vs integrasi, tergantung tujuan, cakupan, dan

kewenangan yang dimiliki. Keikutsertaan negara dalam organisasi internasional dinilai penting karena dapat memperjuangkan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, memperkuat hubungan internasional, serta meningkatkan ekonomi melalui kolaborasi lintas negara (Iskandar, 2021).

Konsep keamanan non-tradisional muncul sebagai respons terhadap meluasnya ancaman global yang tidak lagi terbatas pada aspek militer, melainkan mencakup isu-isu seperti kemiskinan, perdagangan manusia, terorisme, perubahan iklim, wabah penyakit, dan kejahatan siber yang mengancam kesejahteraan individu dan stabilitas masyarakat (A'raf, 2015; Buzan & Hansen, 2009). Dalam pendekatan ini, fokus bergeser dari perlindungan negara ke perlindungan manusia, melalui konsep "keamanan manusia" yang menekankan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan, seperti dipopulerkan oleh UNDP pada tahun 1994. Teori interdependensi kompleks Keohane dan Nye turut memperkuat urgensi kolaborasi internasional, mengingat ancaman ini bersifat lintas batas dan multidimensi. Organisasi seperti Uni Afrika turut berperan dalam menanggapi tantangan ini melalui kerja sama regional dan pemberdayaan komunitas. Meski memiliki pendekatan yang lebih holistik dan humanistik, keamanan non-tradisional tetap menghadapi hambatan implementasi, terutama di wilayah dengan konflik kepentingan, kompleksitas geopolitik, dan keterbatasan sumber daya (Araf & Abbas, 2008).

Strategi keamanan dan pertahanan regional Afrika harus dianalisis melalui pendekatan yang menyeluruh dan multidimensi, yang mencakup keterkaitan keamanan antarnegara di kawasan (RSCT), pembentukan persepsi ancaman melalui norma dan identitas (konstruktivisme), peran penting organisasi internasional dalam membangun kerja sama dan merumuskan kebijakan kolektif, serta pengakuan terhadap ancaman non-tradisional yang menekankan pada perlindungan manusia dan interdependensi global. Keempat teori ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman komprehensif terhadap dinamika keamanan di Afrika, yang melibatkan aktor negara maupun non-negara, isu militer maupun non-militer, serta pentingnya kolaborasi regional dan internasional dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik. Dengan menggunakan metode ini dapat membantu peneliti dalam memahami masalah – masalah terkait strategi keamanan dan pertahanan regional Afrika pada studi kasus peran Uni Afrika dalam mengatasi konflik dan ancaman non-tradisional periode 2022 – 2024. Selain itu, deskriptif analitik merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengidentifikasi, melakukan pengukuran variabel, serta mencari hubungan antar variabel untuk menjelaskan fenomena yang diamati oleh peneliti (Heryana, 2020). Hal ini akan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan *internet-based research*. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2018). Adapun, *internet-based research* adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan meneliti dokumen – dokumen penting yang berisi data atau informasi

terkait fenomena yang di teliti secara online (Hadari, 2015).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada penjelasan Miles dan Huberman yang menggunakan tiga langkah, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saldana, 2014). Kondensasi data merujuk kepada seleksi, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi informasi dari catatan lapangan yang ditulis, hasil wawancara maupun dokumen dan bahan empiris pada penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, matriks, grafik, bagan dan jaringan. Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan yang berupa temuan, Gambaran atau deskripsi dari hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan pada penelitian yang telah dilakukan.

Pada uji keabsahan data, peneliti menggunakan uji triangulasi. Uji triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan informasi diluar data sebagai keperluan pembanding data (Moleong, 2018).

PEMBAHASAN

A. Keamanan dan Pertahanan Regional

Setelah Perang Dunia II, konsep keamanan berkembang dari fokus tradisional yang menitikberatkan pada perlindungan negara dari ancaman militer ke pendekatan yang lebih luas dan kompleks, yaitu keamanan non-tradisional yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Negara tetap menjadi aktor utama dalam menjamin kesejahteraan warganya melalui instrumen seperti pertahanan nasional, yang berperan penting dalam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Konsep ketahanan nasional Indonesia sendiri berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta menggunakan pendekatan astagatra, yaitu delapan aspek kehidupan nasional yang meliputi faktor geografis, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan sebagai elemen strategis dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan (ATGH).

Dalam konteks keamanan manusia, fokus bergeser dari perlindungan negara ke perlindungan individu dan masyarakat secara menyeluruh, sebagaimana ditegaskan oleh PBB melalui pendekatan tujuh dimensi kerawanan seperti ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik. Perspektif ini memperluas pemahaman keamanan, yang kini mencakup pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar perlindungan. Hal ini menegaskan bahwa strategi keamanan dan pertahanan regional tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan militer semata, melainkan harus dibangun secara kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada manusia guna menghadapi ancaman global yang semakin kompleks dan lintas batas.

B. Peran Uni Afrika

Uni Afrika (UA) memainkan peran penting dalam menangani isu *Internally Displaced Persons* (IDPs) melalui berbagai fungsi organisasi internasional, seperti

normatif, informatif, operasional, pembuatan peraturan, dan pengawasan. Fungsi normatif UA tercermin dalam upaya mereka menerapkan Hukum Humaniter Internasional dan mendesak negara anggota untuk mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan terhadap IDPs ke dalam hukum nasional masing-masing. Salah satu tonggak penting adalah diadopsinya Konvensi Kampala tahun 2009, yang menjadi instrumen hukum pertama di dunia yang mengikat secara hukum untuk perlindungan IDPs (African Union, 2018). Selain itu, pernyataan resmi Ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki Mahamat, pada World Humanitarian Day 2018 menekankan pentingnya kerja sama antarnegara Afrika untuk memperkuat kerangka hukum dan memperluas perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik (African Union, 2018).

Dalam fungsi informatif dan operasional, UA mengembangkan pusat informasi seperti situs web resmi dan menunjuk Special Rapporteur khusus untuk pengungsi dan IDPs guna mengumpulkan data lapangan dan menyusun rekomendasi kebijakan. Dari sisi operasional, UA juga mengerahkan misi perdamaian seperti AMISOM di Somalia untuk menanggulangi dampak konflik dan mencegah meningkatnya jumlah IDPs (AMISOM, 2018). Sementara itu, fungsi pengawasan dijalankan melalui Specialized Technical Committees (STC) yang bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi program serta memberikan laporan berkala kepada Dewan Eksekutif UA (African Union, 2018). Keseluruhan pendekatan ini menunjukkan bagaimana UA berupaya memberikan perlindungan komprehensif terhadap IDPs dengan melibatkan kerangka hukum, operasional, dan kerja sama antarnegara sebagai fondasi utama.

C. Ancaman Keamanan Non-Tradisional Utama yang Dihadapi oleh Negara-Negara Afrika

Afrika saat ini menghadapi berbagai ancaman keamanan non-tradisional yang semakin kompleks dan terfragmentasi, sebagian besar dipicu oleh kombinasi ketimpangan ekonomi, tata kelola yang buruk, serta tekanan demografis dan lingkungan. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan di banyak negara Afrika, ketimpangan distribusi kekayaan masih menjadi masalah serius. Bahkan, menurut data Bank Dunia, setengah dari negara-negara Afrika mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan meskipun tingkat kemiskinan menurun, seperti di Rwanda, Chad, dan Ethiopia. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga horizontal antara kelompok identitas, wilayah geografis, dan kawasan perkotaan-pedesaan yang menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan risiko konflik bersenjata, kerusuhan perkotaan, serta terorisme (Dowd, 2015).

Demokratisasi di Afrika setelah Perang Dingin membawa harapan, namun proses ini seringkali tidak tuntas. Di satu sisi, demokrasi memperluas partisipasi politik; di sisi lain, lemahnya institusi negara dan manipulasi kekuasaan justru menciptakan sumber ketidakstabilan baru. Misalnya, kasus seperti manipulasi batas masa jabatan presiden dan praktik diskriminatif menciptakan ketegangan politik yang serius, sebagaimana terlihat di Burundi dan Republik Demokratik Kongo (DRC). Demokrasi elektoral yang diterapkan di tengah institusi negara yang rapuh sering kali justru memperparah kekerasan, terutama di daerah urban yang merasa termarginalisasi. Menurut Golooba-Mutebi dan Sjögren (2017), ketimpangan representasi politik ini dapat memicu kekerasan politik baru di perkotaan.

Selain itu, lemahnya kontrol negara atas wilayah-wilayah tertentu memungkinkan aktor bersenjata non-negara seperti milisi dan organisasi kriminal untuk berkembang, seperti yang terjadi di Mali utara dan Somalia.

Faktor lain yang memperburuk situasi adalah urbanisasi yang sangat cepat tanpa diimbangi oleh penyediaan layanan dan infrastruktur yang memadai. Urbanisasi di Sub-Sahara meningkat dari kurang dari 20% pada 1970 menjadi hampir 40% saat ini, disertai ledakan populasi perkotaan hingga 100% antara 1995 dan 2015. Hal ini menyebabkan pengangguran massal, terutama di kalangan pemuda, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan subur bagi kekerasan geng, radikalisasi, dan konflik komunal. Østby (2016) menyebut bahwa marginalisasi sosial-ekonomi migran dari pedesaan ke kota meningkatkan kekerasan perkotaan, sementara Mousseau (2011) menyoroti bahwa kemiskinan urban berkorelasi tinggi dengan dukungan terhadap kelompok teroris. Lebih jauh lagi, kekerasan yang telah terjadi sebelumnya juga memperparah keadaan karena meninggalkan luka sosial dan memperbesar peluang radikalisasi. Seperti ditunjukkan oleh Finkel et al. (2016), paparan terhadap kekerasan komunal di negara-negara seperti Burkina Faso, Nigeria, dan Chad secara signifikan meningkatkan dukungan terhadap ekstremisme kekerasan. Ini menjelaskan mengapa wilayah-wilayah yang sebelumnya mengalami konflik seperti Kenya, Libya, dan Mali kini menjadi rentan terhadap kekerasan Islamis yang lebih luas.

D. Peran Uni Afrika dalam Mengatasi Ancaman Keamanan Non-tradisional di Kawasan Afrika

Uni Afrika (AU) telah mengambil peran sentral dalam menangani berbagai ancaman keamanan non-tradisional yang terus berkembang di benua Afrika. Salah satu upaya utama AU dalam menjaga perdamaian adalah pembentukan African Peace and Security Architecture (APSA), sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk memungkinkan AU, komunitas ekonomi regional (REC), dan mekanisme regional (RM) menjalankan mandat mereka dalam mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik (Komisi Uni Afrika, 2015). Walaupun APSA telah menunjukkan sejumlah keberhasilan, kemampuan kerangka kerja ini masih terbatas dalam menangani bentuk-bentuk kekerasan yang tidak terpusat serta penyebab struktural ketidakamanan seperti ketimpangan ekonomi, marginalisasi sosial, dan degradasi lingkungan. Fokus APSA yang cenderung militeristik dinilai kurang memadai dalam merespons bentuk kekerasan baru yang lebih sporadis dan tersebar.

Dalam mendukung upaya ini, AU juga mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan kegiatan perdamaian. Keputusan Majelis AU pada tahun 2015 menargetkan kontribusi sebesar 25% dari biaya operasi perdamaian Afrika, di luar misi besar seperti AMISOM. Langkah ini diwujudkan melalui AU Peace Fund, yang bertujuan memperkuat investasi pada mediasi, diplomasi preventif, dan kapasitas kelembagaan (Uni Afrika, 2016). Meski begitu, kenyataannya, 98% dari pendanaan inisiatif perdamaian AU masih berasal dari mitra eksternal seperti Uni Eropa. Tantangan lain adalah ketimpangan fokus APSA, yang lebih menitikberatkan pada respons darurat ketimbang strategi jangka panjang seperti pembangunan perdamaian berkelanjutan. Padahal, kekerasan di Afrika kini lebih sering bersifat rendah intensitas, terdesentralisasi, dan tidak selalu berupa perang konvensional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, AU menekankan perlunya penyesuaian pendekatan yang lebih holistik dan preventif. Hal ini tercermin dalam APSA Roadmap 2016–2020, di mana pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik struktural dijadikan dua dari lima prioritas strategis. Namun dalam praktiknya, dua aspek ini tetap menjadi titik lemah dalam implementasi APSA. Diperlukan integrasi antara upaya pembangunan, pencegahan konflik, dan manajemen krisis yang selama ini berjalan secara terpisah. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan Komisi Uni Afrika (2015), penyusunan strategi yang menargetkan akar permasalahan, seperti ketidaksetaraan ekonomi, pengangguran pemuda, dan tata kelola yang buruk, menjadi penting untuk membendung konflik sejak dini. Dengan demikian, AU tidak hanya perlu memperkuat institusinya, tetapi juga memastikan bahwa seluruh upaya perdamaian dilakukan dalam kerangka kerja komprehensif yang melibatkan berbagai aktor pembangunan dan keamanan secara terkoordinasi.

E. Faktor Penghambat yang Dihadapi Uni Afrika dalam Mengimplementasikan Strategi Keamanannya

Meskipun Afrika telah mencatat kemajuan signifikan dalam mengurangi konflik bersenjata sejak berakhirnya Perang Dingin, tantangan keamanan baru justru bermunculan dalam bentuk yang lebih terdesentralisasi seperti terorisme, kerusuhan perkotaan, dan pemberontakan kecil di wilayah pinggiran. Perubahan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, proses demokratisasi yang belum tuntas, tata kelola yang lemah, serta tekanan demografis seperti urbanisasi cepat dan ledakan populasi muda yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial (Giga, 2018). Konflik yang berulang lebih umum terjadi dibanding konflik baru, menandakan adanya “perangkap konflik” yang sulit diatasi hanya melalui pendekatan tradisional.

Respons Uni Afrika dan komunitas internasional terhadap dinamika ini masih didominasi pendekatan militer, sementara upaya pencegahan dan pembangunan perdamaian jangka panjang belum menjadi fokus utama. Menurut Giga (2018), strategi keamanan saat ini gagal menanggapi penyebab struktural ketidakamanan seperti ketimpangan sosial, marginalisasi politik, dan lemahnya kapasitas negara. Situasi ini diperparah oleh tidak adanya pemisahan yang jelas antara fase pencegahan, penanganan, dan rekonstruksi pascakonflik, sebagaimana terlihat dalam konflik di Sudan Selatan, Mali, dan Republik Afrika Tengah. Dalam hal ini, pendekatan darurat yang bersifat reaktif telah membatasi efektivitas APSA (African Peace and Security Architecture), karena tidak mampu menangani kompleksitas konflik masa kini yang bersifat jangka panjang dan beragam.

Konflik bersenjata saat ini di Afrika juga semakin dipengaruhi oleh aktor non-negara dan keterlibatan lintas batas. Menurut data dari Deltenre dan Liégeois (2016), sekitar 79% perang saudara di Afrika kini bersifat transnasional, dengan 29% kelompok pelaku beroperasi lintas negara. Serangan teroris juga meningkat tajam sejak 2010, terutama di wilayah timur, barat, dan utara Afrika (Raleigh et al., 2010). Sementara kejahatan terorganisasi seperti perdagangan narkoba belum sepenuhnya terukur, indikasi kuat menunjukkan dampak negatifnya terhadap stabilitas politik dan ekonomi di negara-negara seperti Mali dan Guinea-Bissau. Kompleksitas dan keragaman tantangan ini

menegaskan perlunya reformasi besar dalam strategi keamanan AU, termasuk integrasi pembangunan dan keamanan serta peningkatan kerja sama regional untuk menghadapi ancaman yang bersifat lintas batas dan multidimensional.

KESIMPULAN

Strategi keamanan dan pertahanan regional Afrika sangat bergantung pada peran Uni Afrika dalam mengatasi konflik dan ancaman non-tradisional. Melalui berbagai inisiatif seperti mediasi konflik, misi perdamaian, dan pemberantasan terorisme, Uni Afrika berusaha mengatasi berbagai tantangan keamanan yang kompleks. Selain itu, intervensi kemanusiaan dan peningkatan kapasitas militer negara-negara anggota juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan pendanaan, kurangnya koordinasi antar negara anggota, serta intervensi kekuatan eksternal. Untuk meningkatkan efektivitasnya, Uni Afrika perlu memperkuat struktur kelembagaan, meningkatkan kapasitas keuangan, serta memperdalam kerja sama dengan organisasi internasional dan aktor lokal. Dengan strategi yang lebih terarah dan sinergi yang lebih kuat, Uni Afrika dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan stabilitas dan keamanan yang lebih berkelanjutan di benua Afrika. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen kolektif negara-negara Afrika dalam menghadapi tantangan bersama dan memperkuat integrasi regional dalam bidang keamanan dan pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'raf, A. 2015. *Dinamika Keamanan Nasional*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1).
- Adelia Z Carissa, Salsabila A Auroria dan Sari Putri Tiara. 2024. Peran Organisasi Internasional di Dalam Suatu Negara. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. 1 (6).
- African Union Handbook 2018
- AMISOM. 2018. 10 Years AU & EU Partnership for Somalia. In Amisom-au.org (pp. 1–28). AMISOM Public Information Unit.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Bakry, U. 2015. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. 2011. *The Globalization of World Politics: An introduction to International Relations*. Oxford University Press.
- Buzan, B., & Hansen, L. 2009. *The evolution of international security studies*. Cambridge University Press.
- Buzan, Barry and Wever, Ole. 2003. *Regions and Powers, the structure of international security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Christian von Soest. 2018. Menghadapi Ancaman Baru di Afrika, *Giga*. 2 (8).
- Deltenre, Damien, dan Michel Liégeois (2016), Mengisi Bak Mandi yang Bocor? Pemeliharaan Perdamaian di Afrika dan Tantangan Pemberontakan Bersenjata Transnasional, dalam: *African Security* , 9, 1, 1–20.
- Dimitrova dan Mokhele. 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan ketahanan regional di Karoo Tengah, Afrika Selatan. 14 (1).
- Doll, L. 2021. Hilangnya kerjasama di kawasan Mediterania Timur. *Jurnal Politik Iapss*

- Ilmu Politik, 50, 6-48.
- Dowd, Caitriona (2015), *Keluhan, Tata Kelola dan Kekerasan Islam di Afrika Sub-Sahara*, dalam: *Jurnal Studi Afrika Modern* , 53, 4, 505–531.
- Farzayee, S. 2023. From State-Centric to Security Complexes: A Review of Regional Security Complex Theory in International Relations. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 163–179.
- Finkel, Steven E., John F. McCauley, Chris A. Belasco, dan Michael Neureiter (2016), *Kekerasan Kontekstual dan Dukungan terhadap Ekstremisme Kekerasan: Bukti Sahel* , https://cidcm.umd.edu/sites/cidcm.umd.edu/files/mccauley_cidcm_paper.pdf (23 Mei 2018).
- Fjader, Christian. 2014. The Nation-State, Nation Security and Resilience in the Age of Globalization, *Journal Resilience*, Vol. 2, No.2 hlm. 114-129.
- Giga. 2018. Menghadapi Ancaman Keamanan Baru di Afrika. di akses dari <https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/dealing-with-new-security-threats-in-africa>
- Golooba-Mutebi, Frederick, dan Anders Sjögren (2017), *Dari Pemberontakan Pedesaan hingga Kerusuhan Perkotaan: Persaingan Politik dan Perubahan Pola Pemberontakan Politik yang Penuh Kekerasan di Uganda*, dalam: *Commonwealth & Comparative Politics* , 55, 1, 22–40.
- Hadari, N. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hartana. 2022. Eksistensi Organisasi Internasional melalui Kolaborasi guna Mempererat Hubungan Antar Negara. 10 (1)
- Heryana, Ade. 2020. *Etika Penelitian*. Berkala Arkeolog
- ICRC. 2010. *Afghanistan: ICRC activities during July 2010*. Diunduh dari ICRC.com:<https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/update/afghan-update-100810.htm>
- ICRC. 2018. *Annual Report*. Geneva: International Committee of The Red Cross. Diunduh dari <https://www.icrc.org/en/document/annual-report-2018>
- Iskandar, Nursiti. 2021. Peran Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asas i Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3).
- Juma, T. 2022. Persahabatan dan permusuhan dalam integrasi regional; Komunitas Afrika Timur (EAC) pengalaman. *Jurnal Internasional Kebijakan Dunia dan Studi Pembangunan*, (82), 57- 65.
- Komisi Uni Afrika (2015), *Arsitektur Perdamaian dan Keamanan Afrika. Peta Jalan APSA 2016–2020* , www.peaceau.org/uploads/2015-en-apsa-roadmap-final.pdf (23 Mei 2018).
- Lemhannas. 2016. *Modul Bidang Studi Geostrategi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Lemhannas.
- Martens, B., Crum, M., & Poist, R. 2011. Meneliti anteseden keamanan rantai pasokan efektivitas: studi eksploratif. *Jurnal Logistik Bisnis*, 32 (2)
- Maskell, P. 2001. Menuju teori berbasis pengetahuan tentang klaster geografis. *Industri dan Perubahan Perusahaan*, 10(4), 921-943.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Mousseau, Michael (2011), *Kemiskinan Perkotaan dan Dukungan terhadap Terorisme*

- Islam: Hasil Survei Muslim di Empat Belas Negara, dalam: *Journal of Peace Research* , 48, 1, 35–47.
- Muggah, R. 2006. *No Refugee The Crisis of Refugee Militarization in Africa*. London: Zed Books Ltd.
- Nilamsari, N. 2014. *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*. Wacana Volume 8 (2).
- Nursapiah, H. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Østby, Gudrun (2016), *Migrasi Pedesaan-Perkotaan, Ketimpangan dan Gangguan Sosial Perkotaan: Bukti dari Kota-Kota Afrika dan Asia*, dalam: *Manajemen Konflik dan Ilmu Perdamaian* , 33, 5, 491–515.
- P.H. Liotta. 2002. *Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security*, *Security Dialogue*, Vol. 4 hlm. 473-488.
- Pranowo, M. Bambang. 2010. *Multidimensi Ketahanan Nasional*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Raleigh, Clionadh (2015), *Pola Kekerasan Perkotaan di Negara-negara Afrika*, dalam: *International Studies Review* , 17, 1, 90–106.
- Raleigh, Clionadh, Andrew Linke, Håvard Hegre, dan Joakim Karlsen (2010), *Memperkenalkan ACLED: Fitur Data Khusus Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata*, dalam: *Journal of Peace Research* , 47, 5, 651–660.
- Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Amerika Serikat: SAGE Publication Inc.
- Silve, A. dan Verdier, T. 2018. *Teori kompleks konflik regional*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 133, 434-447.
- Soderbaum, Fredrik and Tavares, Rodrigo. 2009. *Problematising regional organisation in African security*. *African Security*. 2 (2-3).
- Straus, Scott (2012), *Perang Memang Berakhir Perubahan Pola Kekerasan Politik di Afrika Sub-Sahara*, dalam: *African Affairs* , 111, 443, 179–201.
- Sudiar, S. 2019. *Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara*. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2),
- Sugito. 2016. *Organisasi Internasional, Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta : The Phinisi Press
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uni Afrika (2016), *Menjamin Pembiayaan yang Dapat Diprediksi dan Berkelanjutan untuk Perdamaian di Afrika (Laporan Kaberuka)* , Addis Ababa: Uni Afrika.
- United Nation Trust Fund for Human Security. 2016. *Human Security Handbook: An Integrated Approach for the Realization of the Sustainable Development Goals and the Priority Areas of the International Community and the United Nations System*, New York : United Nations.
- Vines, Alex. 2013. *Satu dekade Arsitektur Perdamaian dan Keamanan Afrika*. *Urusan Internasional*. 89 (1): 89-109.
- Vladan Holcner dan Drazen Smiljanic. 2018. *Sustainability of Defence Sector and Stability of Defence Expenditure*, dalam *Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research*, (Brno: Faculty of Economics and Administration Departement of Public Economics, Masaryk University), hlm. 124-131.
- Wagiman, Mandagi A. S. 2016. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

- Wagner, Cara Marie. 2013. Reconsidering peace in the Horn of Africa, the impact of increased cooperation and the African Peace and Security Architecture. *African Security Review*. 22 (2)
- Williams, Paul D. 2011. Perang dan konflik di Afrika. Cambridge : Kebijakan
- Yorke, Edmund. 2001. Inisiatif regional dan bentuk intervensi non-PBB di kawasan Sub-Sahara Afrika. Dalam Gordon, DS dan Toase, FH Aspek pemeliharaan perdamaian London : Frank Cass
- Zakiah. 2015. Regional Security in Africa The Dynamic and Challenges Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 1 (1)